

EVALUASI KEBIJAKAN DILIHAT DARI ASPEK DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HAYAPING KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR

(Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan)

Muhammad Zakirin, Jauhar Arifin

muhammad.zakirin999@gmail.com, jauhar58@yahoo.com

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Kampus: Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong

Telp./Fax.0826-2022484 Kode Pos 71571

info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, ataukah sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan program keluarga harapan dan mengetahui dampak yang diberikan di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan. Adapun Teknik Analisis Data memakai komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber : Miles and Huberman. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap : 1) Wawancara; 2) Observasi; 3) Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan berdasarkan teori William Dunn tentang Indikator Evaluasi Kebijakan dapat dikategorikan sangat berdampak.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PKH, Pendidikan, Dampak.

POLICY EVALUATION VIEW FROM THE ASPECT OF THE IMPACT OF THE HOUSEHOLD PROGRAM (PKH) IN HAYAPING VILLAGE, AWANG SUBDISTRICT, BARITO TIMUR REGENCY (CASE STUDY ON EDUCATION COMPONENT)

ABSTRACT

Policy evaluation is an assessment given to a policy, whether the policy can have a positive impact or a change for the better than before the policy was implemented, or vice versa. The purpose of this study was to analyze the policy evaluation of the family of hope program and find out the impact it had in Hayaping Village, Awang District, East Barito Regency. The research method used is a qualitative method. The theory used in this research is William Dunn's theory of policy evaluation indicators, namely: 1) Effectiveness; 2) Efficiency; 3) Adequacy; 4) Equity; 5) Responsiveness; 6) Accuracy. The Data Analysis Technique uses the components of the Interactive Model Data Analysis Source: Miles and Huberman. As for the data collection techniques used in this study, there are three stages: 1) Interview; 2) Observation; 3) Documentation. The results of this study indicate that the Family Hope Program in the education component based on William Dunn's theory of Policy Evaluation Indicators can be categorized as having a very impactful impact.

Keywords: *Evaluation, Policy, PKH, Education, Impact.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya.

Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus kemiskinan, dimana hampir disetiap daerah angka kemiskinan meningkat dikarenakan faktor ekonomi.

Pemerintah sendiri telah melakukan banyak cara untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam tiap tahunnya dilihat berdasarkan

tabel kemiskinan Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, telah mengalami penurunan yang meskipun belum terlalu signifikan tetapi telah menunjukkan bahwa peran khususnya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya sekedar wacana belaka.

Program Keluarga Harapan membantu Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan rakyat Indonesia. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.

Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa-desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di bidang perekonomian. Pemerintah Kabupaten Barito Timur berupaya menerapkan Program Keluarga Harapan dengan harapan agar hasil yang didapat sama dengan kabupaten atau kota lainnya di

Indonesia. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barito Timur sudah dilaksanakan sejak dari Tahun 2014.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Barito Timur, pada Tahun 2014 yang melaksanakan Program Keluarga Harapan masih 4 (Empat) Kecamatan saja dari 10 (Sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Raren Batuah, dan Kecamatan Pematang Karau. Kemudian di Tahun 2016 bertambah menjadi 6 Kecamatan, dan di Tahun 2018 seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Kecamatan Awang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Timur yang melaksanakan Program Keluarga Harapan di tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimanakah evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat melalui aspek dampak di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur ? Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi kebijakan program keluarga harapan dan mengetahui dampak yang diberikan di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini yaitu mendukung teori (Dunn, 1999)

menyatakan bahwa tentang indikator menentukan kriteria evaluasi : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi

(Suharso, 2005) menyatakan bahwa Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai. Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*).

Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1). Fokus Nilai.

Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2). Interdepedensi Fakta – Nilai.

Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

3). Orientasi Masa Kini dan Masa

Lampau.

Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).

4). Dualitas Nilai.

Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain) menurut (LANRI, 2004).

Menurut (Arikunto, 2005) dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkupnya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti : ulangan harian (Arikunto, Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi, 2005). Sederhana tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (Arikunto, Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi, 2005) Scriven lihat (al, 1999) evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung.

Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif

cepat (*shot term data*). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan.

Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: “Proses pengukuran dan pembandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.

b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “Korektifitas” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan - penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan itu terjadi. Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat

berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin berkurang.

c. Penilaian bersifat “*prescriptive*”. Sesuatu yang bersifat “*prescriptive*” adalah yang bersifat “mengobati”. Setelah melalui diketemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.

d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain (Siagian, 1970)

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari

suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut (Dye, 1978) dalam Understanding Public Policy adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Pakar lain Nakamura dan Smallwood lihat (Ekowati, 2005) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, (Sunggono, 1994) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu : 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penilaian kebijakan atau evaluasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian dari suatu masalah, lebih lanjut (Dye, Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey., 1999) menyatakan bahwa “ *Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Menurut (Mustopadidjaja, 2003) merumuskan lebih operasional lagi, yaitu : kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, Negara dan pembangunan. Tidak semua kebijakan publik setelah diimplementasikan akan berhasil dan begitu juga sebaliknya tidak semua kebijakan publik gagal dalam implementasinya, kegagalan tersebut menurut (Gunn, 1989) seperti dikutip oleh (Wahab, 1990) disebabkan oleh, (1) karena *non implementation* (tidak diimplementasikan) dan (2) karena *unsuccessfull* (implementasi yang tidak berhasil).

Lebih lanjut menurut (Dunn W. N., 1999) dalam menentukan kriteria evaluasi terdapat 6 (enam) indikator yang penting untuk diketahui, yakni antara lain :

1. Efektivitas, Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi, Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan, Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan, Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan, Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

4. Dampak Kebijakan

Menurut (Dye T. R., 2004) seperti dikutip dalam (Winamo, 2016)

menyatakan bahwa dampak kebijakan (*policy impact* atau sering juga disebut *policy consequences*) adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan/program dalam kondisi kehidupan nyata. (Jones, 2002) seperti dikutip dalam (Islamy, 2006) mengartikan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan/program; misalnya apakah dengan dibangunnya banyak sekolah dasar telah memberikan akibat semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar. Pengertian dampak kebijakan/program ini berbeda dengan pengertian hasil kebijakan/program (*policy outputs*) yang mengandung pengertian sebagai apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya suatu kebijakan; misalnya kebijakan tentang perumahan akan menghasilkan berdirinya bangunan-bangunan rumah.

Dampak dari suatu kebijakan/program publik mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam mengevaluasi atau menilai dampak kebijakan/program. Dimensi-dimensi dampak kebijakan publik menurut (Anderson, 2000) seperti dikutip dalam (Islamy, 2006) dan (Dye T. , 2004) dalam (Winamo B. , 2016) mencakup lima dimensi seperti diuraikan/dijelaskan sebagai berikut :

(1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), baik pada masalahnya maupun pada masyarakat. Dengan demikian harus ditentukan lebih dahulu sasaran atau kebijakan/program itu terutama ditujukan untuk siapa, misalnya apakah pada masyarakat miskin, pengusaha

ekonomi lemah, petani, guru dan sebagainya. Bila kebijakannya atau programnya mengenai memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka.

Tetapi pula mungkin timbul dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagian anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya kebijakan program anti kemiskinan tersebut.

(2) Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar atau yang bukan sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini biasa dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah atau limbah kebijakan (*externalities or spillover effects*). Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok di luar sasaran/tujuan kebijakan (eksternalitas) dapat yang positif atau juga yang negatif. Contoh, percobaan-percobaan senjata nuklir di atmosfer akan membantu pengembangan persenjataan, tetapi sekaligus juga akan menimbulkan bahaya pada penduduk dunia pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Contoh dampak positifnya misalnya tentang kebijakan penurunan tarif ekspor untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, maka dampak positifnya adalah para konsumen akan memperoleh keuntungan dengan adanya harga-harga yang murah sebagai akibat bertambahnya import barang-barang tersebut.

(3) Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Pertanyaan yang diajukan misalnya : apakah suatu

kebijakan/program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Misalnya, dengan kenaikan harga BBM, apakah dimaksudkan hanya untuk mengatasi adanya kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur, ataukah untuk mempengaruhi atau mengubah pola-pola ekonomis masyarakat di masa-masa yang akan datang. Juga kebijakan tentang lokalisasi pelacuran, apakah akan mempunyai dampak hilangnya pelacur-pelacur gelap/liar ataukah pada jangka panjang suatu daerah akan bebas dari adanya kegiatan pelacuran.

(4) Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*) yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan/program tersebut. Menghitung biaya untuk setiap kebijakan/program ekonomi pemerintah (*economis costs*) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*). Menghitung biaya pembangunan lokalisasi PSK jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak sosial dari adanya lokalisasi tersebut.

(5) Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai karena sulitnya hal tersebut diidentifikasi/diukur; misalnya, begitu sulitnya mengukur ketidaknakan, keresahan sosial dan sebagainya sebagai akibat adanya kebijakan di bidang pembangunan kota.

5. Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut (Dunn W. , 1999) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut :

a. **Efektivitas**, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

b. **Efisiensi**, menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

c. **Kecukupan**, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

d. **Pemerataan**, Bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata

e. **Responsivitas**, keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya

f. **Ketepatan**, adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan.

6. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional ini dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara lain di dunia bukan cuma di Indonesia, terutama masalah kemiskinan kronis.

b. Manfaat PKH

PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas layanan pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program

dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dengan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapat subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KKS, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

c. Tujuan PKH

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS, 2017).

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen

kesehatan dengan kriteria ibu hamil / menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD /MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan dimulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

d. Lembaga Pendukung PKH

Dalam pelaksanaan PKH terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program tingkat provinsi, dan PT.Pos yang bertugas menyampaikan

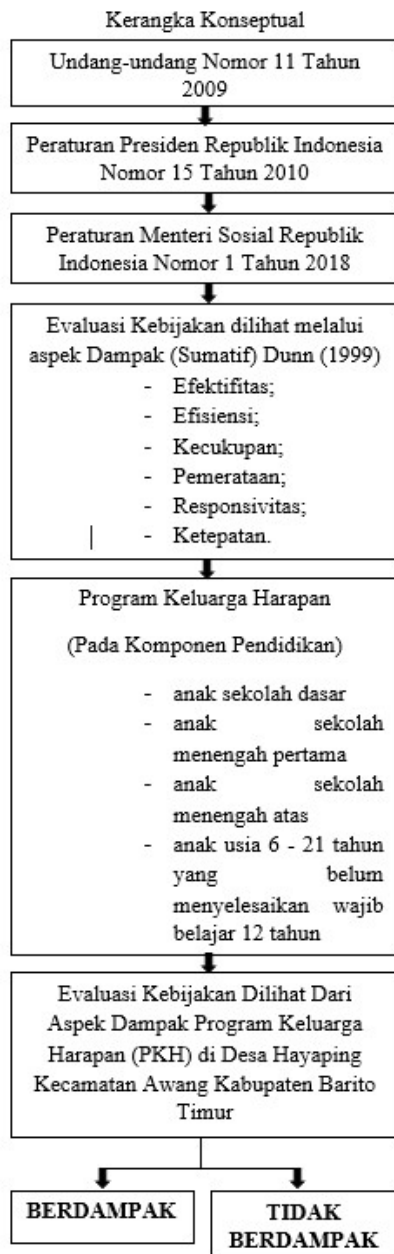
informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan menyampaikan bantuan ketangan penerima manfaat langsung. Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

e. Sumber Dana PKH

Sumber dana yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN adalah suatu daftar secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. APBN bertujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan Negara agar terjadi keseimbangan dinamsi, dalam rangka melaksanakan kegiatan- kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

7. KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode Kualitatif menurut (Lexy, 2013) adalah “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari beberapa informan yaitu Kepala Desa/Aparat

Desa (1 Orang), Pendamping PKH Kecamatan Awang (1 Orang), dan Masyarakat Penerima manfaat PKH (3 Orang). Sedangkan data sekunder bersumber dari arsip, jurnal, media, buku-buku.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :

- a. Wawancara;
- b. Observasi;
- c. Dokumentasi;

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman model interaktif dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data;
2. Penyajian Data;
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi;

Untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, maka peneliti membuat kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Pengukuran

No	Kriteria	Bobot	Kesimpulan
1.	Sangat berdampak	5	Apabila semua informan menjawab kriteria sangat baik
2.	Berdampak	4	Apabila 4 informan menjawab baik
3.	Cukup berdampak	3	Apabila 3 informan menjawab baik
4.	Belum berdampak	2	Apabila 2 informan menjawab baik
5.	Tidak berdampak	1	Apabila 1 informan menjawab baik

Sumber: Peneliti

apakah PKH dalam studi kasus komponen pendidikan sudah sesuai dengan alternatif pencapaian tujuan. Didapatkan hasil dengan cara penarikan kesimpulan sesuai kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil rekapitulasi wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan teori (Dunn W. , Indikator evaluasi kebijakan, 1999) tentang indikator evaluasi kebijakan, peneliti mendapatkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada 5 informan di Desa Hayaping sebagai berikut :

a. EFEKTIVITAS

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan

Efektifitas

No	Indikator		Hasil
1	Anak Sekolah Dasar (SD)		Sangat Berdampak
2	Anak Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Pertama	Sangat Berdampak
3	Anak Menengah Atas (SMA)	Sekolah Atas	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun		Tidak ada

Sumber: Peneliti

b. EFISIENSI

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah PKH komponen pendidikan ini sudah dijalankan dengan baik dan tepat, maka didapat hasil sebagai berikut :

1	Anak Sekolah Dasar (SD)		Sangat Berdampak
2	Anak Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Pertama	Sangat Berdampak
3	Anak Menengah Atas (SMA)	Sekolah Atas	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun		Tidak ada

Sumber: Peneliti

Tabel 3. Hasil rekapitulasi wawancara

Efisiensi

No	Indikator		Hasil
----	-----------	--	-------

c. KECUKUPAN

Kecukupan mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai. Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah alternatifnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil rekapitulasi wawancara

Kecukupan

No	Indikator		Hasil
1	Anak Sekolah Dasar (SD)		Berdampak
2	Anak Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Pertama	Sangat Berdampak
3	Anak Menengah Atas (SMA)	Sekolah Atas	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun		Tidak ada

Sumber: Peneliti

d. PEMERATAAN

Pemerataan berkenaan dengan sudah merata atau belumnya proses sebuah kebijakan berlangsung. Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah PKH komponen pendidikan prosesnya sudah merata dan didapati hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil rekapitulasi wawancara

Pemerataan

No	Indikator	Hasil
1	Anak Sekolah Dasar (SD)	Sangat Berdampak
2	Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sangat Berdampak
3	Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun	Tidak ada

Sumber: Peneliti

e. RESPONSIVITAS

Responsivitas berkenaan dengan keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah kebijakan ini berdampak terhadap bapak/ibu penerima manfaat, maka didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil rekapitulasi wawancara

Responsivitas

f. KETEPATAN

Ketepatan berkenaan dengan menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan sudah tepat sasaran, tepat prosesnya, tepat tujuannya. Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada

setiap informan berkaitan dengan apakah

No	Indikator	Hasil
1	Anak Sekolah Dasar (SD)	Sangat Berdampak
2	Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sangat Berdampak
3	Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun	Tidak ada

Sumber: Peneliti

sudah tepat alternatif ketepatan seleksi jumlah dan waktu yang ditentukan dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil rekapitulasi wawancara

Ketepatan

No	Indikator	Hasil
1	Anak Sekolah Dasar (SD)	Sangat Berdampak
2	Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sangat Berdampak
3	Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sangat Berdampak
4	Anak usia 6 – 12 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun	Tidak ada

Sumber: Peneliti

Berdasarkan hasil analisis tiap aspek diatas, didapatkan hasil penelitian secara menyeluruh sebagai berikut :

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Wawancara

Dilihat Dari Aspek Dampak

Studi Kasus Komponen

Pendidikan PKH

No	Indikator	Hasil dan Kesimpulan
1	Efektivitas	Sangat Berdampak
2	Efisiensi	Sangat Berdampak
3	Kecukupan	Berdampak
4	Pemerataan	Sangat Berdampak
5	Responsivitas	Sangat Berdampak
6	Ketepatan	Sangat Berdampak

Sumber: Peneliti

B. PEMBAHASAN

(Dunn W. , Kriteria evaluasi kebijakan, 1990) kriteria evaluasi kebijakan terdapat enam indikator, yang dimana dibahas dan ditarik kesimpulan dalam hasil penelitian ini yaitu:

a. Efektifitas, indikator ini sangat berdampak terhadap KPM PKH Komponen Pendidikan karena sesuai dengan tujuan PKH;

b. Efisiensi, indikator ini sangat berdampak terhadap KPM PKH Desa Hayaping karena tidak ada pungli/tarikan dana liar;

c. Kecukupan, dinilai berdampak karena masih ada beberapa KPM PKH yang merasa belum tercukupi;

d. Pemerataan, indikator ini sangat berdampak karena pelaksanaan PKH sudah secara merata;

e. Responsivitas, indikator ini dinilai sangat berdampak karena mendapat respon positif dan berpengaruh positif terhadap kehidupan KPM PKH Komponen Pendidikan Desa Hayaping;

f. Ketepatan, indikator ini dinilai sangat berdampak karena pemberian bantuan tepat sasaran dan tepat waktu tidak ada korupsi waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (studi kasus pada komponen Pendidikan) dikategorikan sangat berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2001). *Abdul WaAnalisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. *Abdul Wahab, Solichin.(2001).*
- al, P. e. (1999). Evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program. *Purwanto et al, 1999:21, 21.*
- Anderson, J. (2000). Dampak Kebijakan Publik. *James Anderson 2000.*
- Arikunto. (2005). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai "suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program". *Arikunto, 2005:10-11, 10-11.*
- Arikunto. (2005). Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi. *Arikunto, 2005:36, 36.*
- Arikunto. (2005). Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi. *Arikunto, 2005:39, 39.*

- Dunn, W. (1999). Indikator evaluasi kebijakan. *William Dunn (1999)*.
- Dunn, W. (1999). Indikator Evaluasi Kebijakan. *William Dunn, 1999:610, 610*.
- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. *William Dunn (1999)*.
- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. *Dunn, 1999:610, 610*.
- Dye, R. T. (1978). Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey. *Dye, R. Thomas. (1978)*.
- Dye, R. T. (1978). Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey. *Dye, R. Thomas. (1978)*.
- Dye, R. T. (1999). Understanding Public Policy, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey. *Dye, 1999:2, 2*.
- Dye, T. (2004). Dampak Kebijakan Publik. *Thomas Dye 2004*.
- Dye, T. R. (2004). Dampak Kebijakan. *Thomas R.Dye 2004*.
- Ekowati, M. R. (2005). Ekowaperencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Bandung: Edisi Revisi, PT Rosdakarya. *Ekowati, Mas Roro Lilik. (2005), 5-6*.
- Gunn, H. d. (1989). Kebijakan Publik gagal dalam implementasi. *Hogwood dan Gunn (1989)*.
- Islamy. (2006). Dampak Kebijakan. *Islamy 2006*.
- Islamy. (2006). Dampak Kebijakan Publik. *Islamy 2006*.
- Jones, C. O. (2002). Dampak Kebijakan. *Charles O. Jones 2002*.
- LANRI. (2004). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN, Edisi Kedua. *LANRI, 2004*.
- Lexy, M. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosida Karya. *Moleong Lexy. (2013), 6*.
- Mustopadidjaja. (2003). Dasar Kebijakan Publik. *Mustopadidjaja, 2003:05, 05*.
- Siagian. (1970). fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri”. *Siagian, 1970:143-144, 143-144*.
- Suharso, D. D. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Semarang: Widya Karya. *Suharso, 2005:136, 136*.
- Sunggono, B. (1994). Kebijakan Publik. *Bambang Sunggono, 1994:23-24, 23-24*.
- Wahab, A. (1990). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. *Wahab 1990:47-48, 47-48*.
- Winamo, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Komparatif. Yogyakarta : CAPS. *Winamo, B. (2016)*.